

Strategi Jepang Menghadapi Rusia Terhadap Sengketa Kepulauan Kuril Tahun 2008-2012

Sandra Monica

Nama Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Bibliografi 4 Buku, 1 Laporan, 3 Website

Abstract

This study will explain about Japanese strategy against Russia on Kuril Islands dispute. Problems that have occurred impact on the bilateral relationship between Japan and Russia. During the conflict between the two countries do confrontation that resulted in this conflict continues to take place. Strategies that do claim the Japanese in the other Kuril Islands between Japan cooperate with the United States in the field of defense, Japan use international law to pressure Russia in ownership Kuril Islands, Japan using the Vienna Convention to strengthen its position on the Kuril Islands, Japan withdrew its ambassador from Russia

Keywords: Kuril Islands, Japanese strategy, defense cooperation, the Law Internasioanal.

Pendahuluan

Jepang merupakan negara di kawasan Asia Timur dengan empat pulau besar, antara lain : Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu serta beberapa pulau kecil seperti kepulauan Ryukyu, Jepang juga mengikutsertakan Kepulauan Bonin, Daito Shoto, Minamijima, Okino Tori Shima dan kepulauan Volcano dengan luas daratan Jepang 374.744 km persegi.¹ Selain Jepang juga mengklaim memiliki laut seluas 3.091 km persegi². Jepang memiliki batas wilayah negaranya yang langsung berbatasan dengan negara China, Taiwan, Korea Selatan dan juga Rusia.

Dalam hal ini, pertentangan wilayah perbatasan terjadi antara Jepang dan ketiga negara tersebut. Jepang memiliki pertikaian dengan Cina dan Taiwan dalam persoalan Kepulauan Senkaku. Jepang juga mempunyai sengketa dengan negara Korea Selatan dan begitu juga dengan Rusia, Jepang juga mengalami sengketa dengan Rusia dalam persoalan Kepulauan Kuril, dimana perseteruan kedua negara

¹Geografi dan Sejarah Jepang, diakses dalam <http://usupress.usu.ac.id/files/Ilmu%20Kejepangan%20I%20Edisi%20Revisi%20bab%201.pdf> pada 31 Maret 2013

² *Ibid*

ini terjadi sejak perang dunia ke II. Hingga sekarang Pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai masih berada dalam kekuasaan Rusia. Namun Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut adalah wilayah teritori Jepang bagian Utara yang telah dijajah oleh Rusia.

Rusia dan Jepang telah pernah menandatangani perjanjian resmi pertama mengenai perbatasan pada tahun 1885 dimana dalam perjanjian ini dicantumkan : “Mulai dari ditandatanganinya perjanjian ini perbatasan kedua negara sudah ditetapkan antara pulau Etorofu dan pulau Uruppu. Seluruh pulau Etorofu merupakan kepemilikan Jepang, dan kepulauan Kuril yang berada di utara serta yang termasuk didalamnya adalah pulau Uruppu merupakan milik Rusia”. Perjanjian Shimoda juga mencantumkan pulau Sakhalin atau Karafuto tidak untuk dibagi tetapi berada dalam pengawasan bersama antara Rusia dan Jepang.

Munculnya permasalahan hubungan antara Jepang dan Rusia tentang kepulauan Kuril karena adanya perjanjian Shimoda tahun 1855 yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa : “selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara pulau Etorofu dan Uruppu. Seluruh Etorofu adalah milik Jepang dan kepulauan Kuril yang terletak disebelah utara dan termasuk pulau Urup akan menjadi milik Rusia.” Sedangkan Pulau Kunashir, Shikotan dan Kepulauan Habomai, yang terletak di sebelah selatan Iturup, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian dan dianggap sebagai pulau-pulau yang tidak disengketakan.

Permasalahan antara Jepang dan Rusia selanjutnya muncul pada tahun 1904-1905 dimana kedua negara saling memperebutkan wilayah Manchuria. Pada tahun 1905 disepakati perjanjian Portsmouth yang merupakan solusi awal yang menyebutkan setengah dari kepulauan Sakhalin selatan menjadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik Uni Soviet pada saat itu. Pada tanggal 8 September 1951 Jepang menandatangani perjanjian San Fransisco yang memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Didalam perjanjian tersebut juga tertuang pasal mengenai wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal.

Dampak dari perjanjian tersebut adalah pernyataan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap kepulauan Kuril, dan perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Rusia atas kepulauan Kuril. Rusia tetap mempertahankan kedaulatan atas kepulauan-kepulauan tersebut dan diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir perang dunia ke II, namun klaim Rusia tersebut ditolak Jepang.

Permasalahan yang telah terjadi selama hampir 65 tahun tersebut berdampak terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Rusia. Selama masa tersebut kedua negara melakukan konfrontasi yang mengakibatkan konflik ini terus berlangsung hingga mencapai puncaknya pada tahun 2007 yang ditandai dengan sebuah kapal patroli Rusia melepaskan tembakan kepada nelayan Jepang dikawasan kepulauan tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah memasuki wilayah yuridiksi Rusia.

Jepang menyerukan agar Rusia meminta maaf atas insiden tersebut, namun justru Rusia melakukan penambahan kekuatan militer dikawasan tersebut. Presiden Rusia Dmitri Medvedev pada masa pemerintahannya melakukan kunjungan ke wilayah kepulauan tersebut dan Jepang beranggapan bahwa kunjungan tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk provokasi dari Rusia yang kemudian Jepang melakukan penarikan duta besar dari Rusia dan memprotes keras kedutaan Rusia di Jepang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah multi case study. Pemilihan strategi ini berimplikasi pada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui riset perpustakaan (*library research*). Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainnya (*document analysis*). Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan Teori Strategi Kemanan yang menjadi prioritas teratas karena berhubungan langsung dengan eksistensi sebagai negara yang berdaulat. Negara sebagai aktor utama berperan dalam mengamati kebijakan yang diarahkan kepada isu keamanan nasional. Asumsi tersebut juga diperkuat oleh Kenneth Waltz yang mengatakan bahwa negara adalah aktor terpenting dalam interaksi hubungan internasional dimana proposisi teoritis utama mengarah kepada kompetisi kepentingan negara-negara untuk mendapatkan *power* atau keamanan (*self interest states compete constantly for power or security*).³ Negara akan berlomba-lomba untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu mendapatkan *power* atau keamanan.

³ Stephen, M Waltz. 1998, International Relations; *One World Many Theories, Foreign Policy*, No.110. Spring, hal. 25

Selanjutnya, penulis menggunakan konsep keamanan nasional dalam memandang masalah perebutan wilayah kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia. Dalam menghadapi masalah ini, kedua negara tentu akan menggunakan kekuatan dalam negeri mereka seperti ekonomi, militer, politik dan sebagainya. Oleh karena itu konsep keamanan nasional dinilai relevan untuk melihat fenomena didalam penelitian ini. Kajian lebih spesifik oleh kaum Realis mendefenisikan konsep keamanan (nasional) sebagai sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer, atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya⁴.

Strategi Jepang Menghadapi Rusia Terhadap Sengketa Kepulauan Kuril

Jika dilihat dari perkembangan hubungan negara Jepang dan Rusia terhadap masalah perbatasan tersebut, dapat dipastikan kata damai atas kepulauan tersebut antara kedua negara masih jauh dari harapan. Meskipun kedua negara sering melakukan pertemuan tingkat tinggi, kedua negara tidak pernah mencapai kata sepakat, karena tidak ada negara yang akan memberikan wilayahnya kepada negara lain secara percuma. Puncaknya bahkan hingga terjadi perang diantara kedua negara yang berkonflik. Startegi yang dilakukan jepang dalam menanggapi masalah perbatasan tersebut antara lain

Jepang bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanannya.

Hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat sangatlah erat, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan politik luar negeri kedua negara yang selaras. Dimulai dengan ditandatanganinya “Perjanjian Perdamaian” yang menjadi landasan hubungan militer dan nantinya akan berlanjut menjadi hubungan ekonomi.

Perjanjian Keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat memberikan hak kepada basis militer Amerika untuk berada di tanah Jepang yang merdeka dan komitmen Amerika Serikat dengan dua tujuan yaitu dukungan posisi militer Amerika di Korea dan perlindungan untuk Jepang yang rapuh karena apa yang telah tertera dalam konstitusi.

Perjanjian Pertahanan antara amerika serikat dan jepang di maksukan untuk meletakkan kekuatan tempur AS di sekitar Jepang yang berfungsi sebagai pencegah terhadap agresi oleh negara manapun yang akan menyerang wilayah Jepang.

⁴ Yulius P. Hermawan (ed), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 28

Meskipun Amerika Serikat tidak mengambil posisi pada klaim-klaim kedaulatan sengketa teritorial Jepang, bisa dibilang itu memang memiliki beberapa tanggung jawab untuk membantu menemukan solusi,

Jepang mengadopsi “*National Defense Program Guideline FY 2005*” yang baru. Rencana berjangka panjang yang ditujukan untuk menuntun perkembangan pertahanan jangka panjang Negara Jepang, dokumen tersebut menekankan ancaman pertahanan Jepang di kawasan Asia Pasifik.

Penataan kembali pasukan AS di Jepang harus dilaksanakan sesegera mungkin sambil memastikan kemampuan operasional termasuk kemampuan pelatihan, komitmen mereka untuk memastikan kembalinya fasilitas dan daerah seperti yang dijelaskan dalam *Consolidation Plan for Facilities and Areas* di Okinawa. Sekitar 9.000 marinir AS akan dipindahkan dari Okinawa ke lokasi di luar Jepang.⁵

Peningkatan kemampuan militer AS di Jepang yang lebih maju diharapkan memberikan kontribusi bagi keamanan Jepang. Peningkatan tersebut antara lain: ⁶

1. Korps Marinir AS memperkenalkan dua skuadron pesawat MV-22 sebagai pengganti helikopter CH-46.
2. AS meletakkan pesawat patroli maritim P-8 US Navy di Jepang untuk pertama kali di luar Amerika Serikat yang dimulai pada Desember 2013.
3. Rencana Angkatan Udara AS menyebarkan pesawat tak berawak Hawk pada musim semi 2014.
4. Korps Marinir AS mulai meletakkan pesawat F-35B pada tahun 2017 di Jepang.

Jepang juga memperkuat perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat melalui kesepakatan terbaru *agreement between Japan and the United States of America concerning new special measures relating to article xxiv of the agreement under article vi of the treaty of mutual cooperation and security between Japan and the United States of America, regarding facilities and areas and the status of United States armed forces in Japan* di tanda tangani pada tanggal 21 Januari 2011.

Perjanjian ini merupakan atisipasi Jepang terhadap permasalahan perbatasan, dan sengketa kepulauan yang terjadi belakangan ini termasuk dengan Rusia.

⁵ *Joint Statement of the Security Consultative Committee Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities*. Issued by Secretary of State John Kerry, Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese Minister for Foreign Affairs Fumio Kishida, and Japanese Minister of Defense Itsunori, 2013

⁶ Ibid hal 10.

Kesimpulan dari perjanjian ini adalah angkatan bersenjata Amerika Serikat dipertahankan di Jepang di bawah Perjanjian tersebut dengan tujuan keamanan Jepang dan pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan di laut Cina Timur dan Cina Selatan.

Jepang Menggunakan Hukum Internasional Untuk Menekan Rusia Dalam Kepemilikan Kepulauan Tersebut.

Klaim Rusia atas kepulauan Kuril berdasarkan hukum internasional lemah, dan terhalang oleh kegagalan pemerintah Soviet menandatangani perjanjian Perjanjian San Francisco. Disisi lain Sejak awal 1960an pemerintah Jepang telah teguh mengklaim keempat pulau menjadi wilayah Jepang. Pandangan resmi Jepang pada sejarah klaim Wilayah Utara kepulauan Kuril yang ditata dalam sebuah pamflet yang mudah diakses di website Kementerian Luar Negeri. Ketentuan utamanya adalah sebagai berikut: ⁷

1. Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam 1945 menyatakan bahwa Jepang harus melepaskan semua wilayah yang telah diambil melalui "kekerasan dan keserakahan" selama ekspansi militer sebelum dan sesudah Perang Dunia ke II. Namun, deklarasi ini tidak berlaku untuk Wilayah Utara, karena pulau-pulau ini tidak pernah menjadi milik Rusia dan tidak dianeksasi ke Jepang selama periode ekspansi Jepang.
2. Sejak awal hubungan diplomatik Rusia-Jepang pada tahun 1855 Rusia telah mengklaim pulau yang disengketakan. Oleh karena itu pulau yang disengketakan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah diakuisisi oleh Jepang melalui "kekerasan dan keserakahan".
3. Perjanjian Yalta menyatakan bahwa Kepulauan Kuril harus diserahkan ke Uni Soviet dan bagian selatan Sakhalin serta semua pulau-pulau berdekatan dengan itu harus dikembalikan ke Uni Soviet, tidak menentukan final penyelesaian masalah teritorial. Selanjutnya, Jepang tidak terikat oleh perjanjian tersebut, karena bukan pihak yang menandatangani perjanjian.
4. Pada tahun 1945 Rusia perang melawan Jepang. Hal ini dianggap pelanggaran Netralitas Pakta Soviet-Jepang, dan pendudukan pulau-pulau di wilayah kepulauan Kuril yang dianggap merupakan pelanggaran hukum internasional. Secara hukum perjanjian tetap berlaku sampai tanggal 13 April 1946, meskipun Uni Soviet mengumumkan tidak memperpanjang pakta perdamaian.

⁷McDevitt, A. Michael and Dmitry Gorenburg, *The Long Littoral Project: Sea of Japan, A Maritime Perspective on Indo-Pacific Security*, CNA Strategic Studies:2013.

5. Meskipun oleh ketentuan Pasal 2c dari perjanjian San Francisco tahun 1951, Jepang melepaskan semua hak atas Kepulauan Kuril, perjanjian tidak berlaku untuk pulau-pulau Kunashiri, Etorofu, dan Shikotan, atau Habomai, karena bukan bagian geografis dari Kepulauan Kuril. Selain itu, Uni Soviet tidak ikut menandatangani San Francisco, sehingga ketentuan-ketentuannya tidak berlaku untuk sengketa antara kedua negara.

Posisi resmi pemerintah Jepang pada status pulau-pulau ini antara lain:⁸

1. Wilayah Utara kepulauan Kuril merupakan wilayah Jepang yang secara ilegal diduduki oleh Rusia. Dari ini permasalahan ini posisi Amerika Serikat juga konsisten mendukung posisi Jepang.
2. Untuk mengatasi masalah ini dan menyimpulkan perjanjian damai sesegera mungkin, Jepang bersedia bernegosiasi dengan Rusia atas dasar perjanjian dan dokumen yang dibuat oleh kedua belah pihak sejauh ini, seperti Deklarasi Bersama Jepang-Soviet 1956, Deklarasi Tokyo 1993, perjanjian Irkutsk 2001 dan Rencana Aksi Jepang-Rusia tahun 2003.
3. Jika Wilayah sengketa di kembalikan pada Jepang, Jepang siap untuk merespon secara fleksibel. Selain itu, karena warga Jepang yang pernah tinggal di Wilayah ini di usir paksa oleh Joseph Stalin, Jepang siap untuk mencari penyelesaian dengan pemerintah Rusia sehingga warga Rusia yang tinggal di sana tidak akan mengalami tragedi yang sama. Dengan kata lain, setelah kembalinya pulau-pulau ke Jepang, Jepang bermaksud untuk menghormati hak-hak, kepentingan dan keinginan penduduk Rusia di pulau-pulau.
4. Pemerintah Jepang telah meminta orang-orang Jepang tidak masuk ke Wilayah sengketa tanpa menggunakan kerangka kunjungan non-visa sampai masalah teritorial diselesaikan. Demikian pula Jepang tidak bisa membiarkan kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi oleh pihak ketiga, yang dapat dianggap sebagai pengakuan "yurisdiksi," atas Rusia atau mengizinkan setiap kegiatan yang dilakukan di bawah asumsi bahwa Rusia memiliki "yurisdiksi" di wilayah ini. Kebijakan Jepang untuk mengambil langkah yang tepat memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.

⁸ Ibid hal 29.

Dalam menanggapi tekanan yang dilakukan Jepang, Rusia juga memberikan pandangan kepemilikan kepulauan Kuril berdasarkan hukum internasional. Posisi Rusia dalam klaim atas kepemilikan kepulauan Kuril antara lain:⁹

1. Berdasarkan Perjanjian Yalta dan San Francisco memberi Uni Soviet sebuah hak eksplisit untuk seluruh rantai Kepulauan Kuril.
2. Rusia mewarisi pulau dari Uni Soviet, Rusia diakui secara internasional sebagai negara pengganti Uni Soviet
3. Pernyataan Jepang bahwa pulau-pulau yang disengketakan adalah perpanjangan utara pulau Hokkaido yang dianggap Rusia adalah taktik menipu yang dirancang untuk mempromosikan klaim teritorial oleh Tokyo dan tidak didukung oleh sejarah atau geografi.

Pemerintah Jepang tampaknya enggan pada kesepakatan atas status kepulauan Kuril. Bagi Jepang sengketa teritorial adalah masalah yang berhubungan dengan sentimen nasionalisme yang cukup kuat, sentimen nasional kekuatannya dalam politik elektoral tidak dapat diabaikan.

Jepang menggunakan Konvensi Wina untuk memperkuat posisinya terhadap kepulauan Kuril.

Di bawah perjanjian hukum internasional kemudian ditafsirkan dan dikodifikasi dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 34 dan 35 tidak ada kewajiban dikenakan pada negara-negara ketiga tanpa persetujuan mereka. Mengenai kasus perjanjian Yalta, negara ketiga yaitu Jepang harus memberikan persetujuan tertulis berdasarkan perjanjian Yalta. Dalam prakteknya tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata akan menerima ketentuan lawan atas disposisi teritorialnya.¹⁰

Namun, Konvensi Wina menciptakan pengecualian dalam perang dengan ketentuan sebagai berikut “asalkan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan piagam PBB, persyaratan dapat dikenakan pada negara yang selanjutnya dapat didefinisikan sebagai agresi. Dalam sudut pandang perjanjian Yalta, pengenaan kewajiban pengembalian kepulauan Kuril pada Uni Soviet tidak berlaku karena Jepang tidak bertindak sebagai agresi terhadap Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Apalagi wilayah kepulauan Kuril tidak tunduk pada agresi, berdasarkan argument di atas diartikan melalui Konvensi Wina bahwa hukum internasional tidak dapat mendukung klaim Soviet atas kepulauan Kuril.

⁹ Ibid hal 32.

¹⁰ Borders, Menas “*Claim and counterclaim in the Kuril Islands dispute*”, 2011.

Pengecualian dalam masa perang bisa melegitimasi pengembalian wilayah disetujui pada Konferensi setelah ditanda tangan perjanjian Yalta kemudian penyesuaian teritorial bisa diterima jika dikodifikasikan tapi ini belum pernah terjadi antara Jepang dan Uni Soviet atau Rusia.

Keterlibatan AS dan Inggris dalam Perang Dunia Kedua berorientasi terhadap keuntungan teritorial yang dibuat sebagai hasil dari agresi. Perjanjian Yalta sendiri tampaknya dibuat untuk melegitimasi wilayah yang di agresi. Sebuah aturan hukum terhadap akuisisi paksa wilayah yang muncul pada masalah diartikulasikan dalam Piagam Atlantik (1941), Deklarasi Kairo (1943), dan Proklamasi Potsdam (1945) bertentangan dengan perjanjian Yalta.¹¹

Ambiguitas atas apa yang terjadi setelah Jepang menyerahkan tuntutananya di antara para penandatangan untuk memberikan hak atas wilayah kepulauan Kuril tersebut. Hukum internasional hanya samar-samar mengakui hak pihak ketiga. Selain itu sebagai bukan penandatangan San Francisco, Uni Soviet bisa dibilang bukan tergabung dalam kekuatan Sekutu. Soviet tidak memasuki perang melawan Jepang sampai bom atom pertama dijatuhkan dan pasukan Soviet hanya menginvasi wilayah Jepang setelah perang selesai. Inilah yang menjadikan kegagalan Rusia mengklaim kedaulatan atas kepulauan Kuril.

Jepang Menarik Duta Besar dari Rusia.

Presiden Rusia pada akhir tahun 2010 melakukan ke kepulauan Kuril, diikuti menteri pertahanan Rusia pada awal tahun 2011. Protes Jepang terkait kunjungan Presiden Rusia Dmitry Medvedev ke Kepulauan Kuril, yang disengketakan Rusia-Jepang, berujung dengan penarikan duta besarnya di ibukota Moskow.

Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara memutuskan menarik sementara duta besarnya untuk Rusia, demikian laporan kantor berita *Kyodo News*. “Saya memutuskan untuk sementara ini memanggil dubes untuk Rusia, Masaharu Kono,” kata Maehara kepada wartawan.¹²

Maehara memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Mikhail Bely untuk menyampaikan protes terhadap kunjungan presiden Rusia. Medvedev menjadi pemimpin pertama Rusia yang berkunjung ke pulau Kunashiri yang terletak di lepas pantai Hokkaido.

¹¹ Ibid hal 3

¹² “Jepang Tarik Pulang Dubesnya Dari Rusia” dialses dari <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=8396> pada tanggal 20 oktober 2013.

Kunjungan Medvedev ke Kuril memperumit hubungan kedua negara, mendahului jadwal kunjungannya ke Jepang dalam pertemuan puncak Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bulan ini. Tetapi sejumlah analis mengatakan itu adalah sinyal ke Tokyo bahwa Moskow tidak akan menyerahkan pulau-pulau tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan bahwa kunjungan Medvedev ke Pulau Kuril adalah hal yang tepat sebagai kepala negara dan Rusia tidak berkeinginan untuk merusak hubungan dengan Jepang.¹³

Lavrov mengatakan Rusia tidak akan mengambil langkah-langkah yang akan membuat kerjasama Rusia-Jepang semakin sulit, tapi Jepang jangan menarik kesimpulan sendiri. Sergei Lavrov mengatakan ingin menekankan sekali lagi bahwa reaksi-reaksi seperti ini dari Jepang tidak bisa diterima.

¹³ “Jepang Ancam Tarik Duta Besarnya di Rusia” diakses dari <http://m.voaindonesia.com/a/85574.html> pada tanggal 20 oktober 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Borders, Menas “*Claim and counterclaim in the Kuril Islands dispute*”, 2011.

McDevitt, A. Michael and Dmitry Gorenburg, *The Long Littoral Project: Sea of Japan, A Maritime Perspective on Indo-Pacific Security*, CNA Strategic Studies:2013.

Stephen, M Waltz. 1998, International Relations; *One World Many Theories*, *Foreign Policy*, No.110. Spring.

Yulius P. Hermawan (ed), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Laporan

Joint Statement of the Security Consultative Committee Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities. Issued by Secretary of State John Kerry, Secretary of Defense Chuck Hagel, Japanese Minister for Foreign Affairs Fumio Kishida, and Japanese Minister of Defense Itsunori, 2013.

Web

Geografi dan Sejarah Jepang, diakses dalam <http://usupress.usu.ac.id/files/Ilmu%20Kejepangan%20I%20Edisi%20Revisibab%201.pdf> pada 31 Maret 2013

“Jepang Tarik Pulang Dubesnya Dari Rusia” dialses dari <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=8396> pada tanggal 20 oktober 2013.

“Jepang Ancam Tarik Duta Besarnya di Rusia” diakses dari <http://m.voaindonesia.com/a/85574.html> pada tanggal 20 oktober 2013.